

CELAH MENGATASI KORUPSI

DUA BULANAN

menembus fakta

karya IFAT FUTUH
(cropping) | Koleksi
Museum
Anak Bajang

SINDHUNATA
Surga
di Bantaran
Kali Code

A.D. HANDOKO
Gerakan Mahasiswa
dalam Pusaran
Neoliberalisme

DANANG BRAMASTI
Standar Mutu
Pembelajaran
Kontekstual

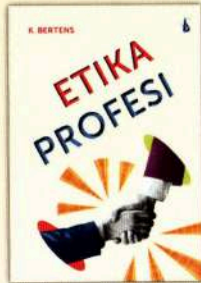
Rp35.000,00

DUA BULANAN, NOMOR 05 - 06, TAHUN KE-73, 2024

Buku Baru Terbit



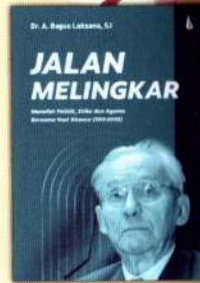
- 1024001008
Pengantar Etika Bisnis
Edisi Revisi
Rp185.000,00



- 1024001014
Etika Profesi
Rp70.000,00



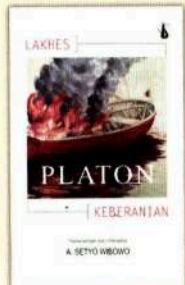
- 1023001061
Dunia Penuh Warna
Spiritualitas Hidup
Sehari-hari
Rp75.000,00



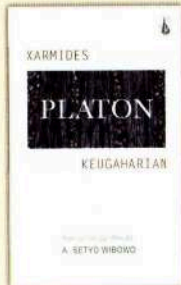
- 1023001060
Jalan Melingkar:
Menafsir Politik, Etika,
dan Agama Bersama
Paul Ricoeur (1913-2005)
Rp58.000,00



- 1023001049
Kebenaran dan Para
Kritikusny
Rp120.000,00



- 1021001009
Platon: Lakhes
(Tentang Keberanian)
Rp70.000,00



- 1015001016
Platon: Xarmides
(Keugaharian)
Rp76.000,00



- 1015001042
Platon: Lysis
(Tentang Persahabatan)
Rp50.000,00



- 1024002002
Sastra Horor
Rp420.000,00

PT KANISIUS
Mengasah Budi Mengolah Hati

Jl. Cempaka 9 Derasan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telp. 0274-588783, 565996, Fax. 0274-563349, Email: office@kanisiusmedia.co.id

Yogyakarta 0274-588783; Jakarta 021-84596565; Tangerang 021-2235630
Bandung 08156885491; Surabaya 031-8709929/8709201; Palembang 088274078134;
Pemasaran Luar Jawa dan Distributor 081392535079; CSO 082237478080; KRC 081904228463

www.kanisiusmedia.co.id | kanisiusmedia | kanisiusshop | pt.kanisius

kanisiusmedia:

JURNALISME SERIBU MATA

BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986.
Jo Ditjen PPC
Nomor 32/Ditjen/PPC/K/1996, 27 Maret 1996
Penerbit

Yayasan BP Basis
Anggota SPS ISSN: 0005-6138
Pemasihat
Franz Magnis-Suseno

Pemimpin Umum
Sindhunata
Pemimpin Redaksi
A. Setyo Wibowo
Wakil Pemimpin Redaksi
A. Sudiarta
Dewan Redaksi
B. Hari Juliawan
Heru Prakosa
A. Bagus Laksana

Redaktur Pelaksana
C. Bayu Risanto
Redaktur
Dian Vita Ellyati
Francisca Purnawijayanti
Redaktur Artistik
Hari Budiono
Sekretaris Redaksi
Anang Pramuriyanto
Promosi/ Iklan
Slamet Riyadi, A. Yulianto
Willy Putraanta
Administrasi/ Distribusi
Francisca Triharyani
Keuangan
Ani Ratna Sari
Widarti

Alamat
Jl Pringrokusuman No. 35, Yogyakarta
Telepon: 081225225423. Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:
basis.adisi@gmail.com
Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:
BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,
BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata
BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / A.
Sudiarta
Ki Hadjar Dewantara:
Trikon - Arah Identitas
Indonesia ... 2

KACABENGALA / A. Setyo
Wibowo
Celah Mengatasi Korupsi ... 5

SOSIAL / A. D. Handoko
Gerakan Mahasiswa dalam
Pusaran Neoliberalisme:
Catatan 25 Tahun Reformasi
Konstitusi ... 21

SOSIAL / Sindhunata
Surga di Bantaran Kali Code
... 31

PENDIDIKAN / Danang Bramasti
Standar Mutu Pembelajaran Kontekstual ... 36

PENDIDIKAN /
Siti Muntomimah & Engelbertus Kukuh Widijatmoko
Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Permainan ... 44

PENDIDIKAN / Haryo Bhagawanta
Banyune Lancar, Rejekine Muncar ... 54

PUISI / Ahmadul Faqih Mahfudz
Telaga Putri ... 60
Panarukan ... 60
Pulau Menjangan ... 61
Perahu Jiwa ... 62
Jauh Sebelum Diciptakan ... 63

CERPEN / Adi Zamzam
Di Antara Kepul Debu dan Batu Bara ... 64

memaksakan kesatuan budaya secara politis dalam NKRI, sebab kesatuan politis tidak berarti menyatukan kekhususan budaya-budaya daerah.

Dalam arti inilah *bhinneka tunggal ika* merupakan semboyan yang pas dalam mengungkapkan arti kesatuan. Faktor penting yang disebut KHD dalam mempertahankan identitas atau kekhususan budaya adalah kepribadian (*persoonlijkheid*), yang berlawanan dengan maksud imperialisme yang mau memaksakan budaya asing ke budaya asli (KHD, 1994: 91-92). Etos semacam inilah yang kiranya berlaku dalam rangka hubungan antarbudaya di Indonesia. Dalam pengertian ini, slogan "NKRI harga mati" harus hati-hati disampaikan dan diterangkan, sebab maksudnya mungkin melawan imperialisme asing tetapi praktiknya bisa saja justru melakukan imperialisme terhadap sesama budaya daerah. Politik hanyalah satu bagian dari budaya, bukan sebaliknya.

Pembentukan – atau mungkin lebih tepat perkembangan – budaya Indonesia yang kontinu- konvergen-konsentris berperan besar dalam pengembangan identitas nasional yang sering menjadi persoalan, khususnya dalam menyongsong perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti; bagaimana identitas nasional harus dirumuskan.

Dua tahun yang lalu Konsorsium Psikokultural Indonesia (KPI) menerbitkan hasil penelitian mengenai identitas keindonesiaan generasi muda dari berbagai etnis dan agama; tepatnya etnis Batak, Tionghoa, Jawa, Bali, dan generasi muda Muhammadiyah. Penelitian dari berbagai literatur dan khususnya wawancara dengan kaum muda ini diberi judul *Aku ini Orang Indonesia, Persilangan Generasi, Budaya, dan Era Zaman* (2022), disunting dan diberi pengantar oleh Nani Nurrachman. Maksud penelitian adalah mencoba menjajaki konstruksi identitas orang muda Indonesia dari sudut pandang psikologi sosial. Dari hasil wawancara dapat dirasakan bagaimana penghayatan anak-anak muda menyangkut identitas bangsa. Dalam refleksi akhir sebagai penutup dari laporan penelitian, Nurrachman mengemukakan empat pokok pikiran yang muncul sebagai berikut.

Pertama, Indonesia adalah *civic nation*, bukan *ethnic nation*, yang menghasilkan *civic identity*, yakni warga negara yang memiliki hak dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan. Kedua, hubungan antara identitas nasional dan lokal merupakan dua macam identitas kolektif yang berbeda dan tidak perlu dipertentangkan. Ketiga, reproduksi identitas nasional terjadi melalui hal-hal yang rutin dan banal, dan keempat untuk mengatasi tantangan partikularisme yang beragam perlu menciptakan ruang-ruang identitas bersama (Nani Nurrachman [ed.], 2022: 222-3).

Dari penelitian memang tidak diharapkan rumusan mengenai identitas keindonesiaan, tetapi suatu gambaran mengenai "proses konstruksi bangunan sosial psikologis" anak-anak muda untuk menjadi manusia Indonesia. Proses ini mengalir dan terus akan berubah, khususnya dalam dinamika ketegangan kultural antara pembentukan identitas lokal dan nasional. Dengan kata lain, merujuk rumusan Nurrachman: "identitas kebangsaan bukanlah identitas yang secara pasif dilekatkan pada orang per orang, atau kelompok, komunitas... Ini menandakan bahwa Indonesia, dan menjadi Indonesia, tidak selesai setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945" (Ibidem: 226). Dengan kata lain, pemaksaan suatu identitas secara politis, melalui penataran-penataran misalnya, justru bisa membahayakan kesatuan Indonesia itu sendiri.

Dari jawaban anak-anak muda yang diwawancarai itu, ketegangan antara budaya lokal yang masih kuat dan memang masih tetap berkembang, dengan budaya nasional yang mereka rasakan, sampai sekarang tetap menjadi tantangan yang kuat. Soalnya, apakah orang-orang yang mengaku diri Indonesia masih tetap setia untuk mengikuti semboyan trikon dalam rangka meneruskan-lanjutkan langkah-langkah pembentukan identitas ini, tanpa lelah dan tanpa akhir. Dan terutama juga, apakah pemerintah mampu mengembangkan dialektika antara budaya lokal dan nasional secara kreatif sehingga pertemuan antarbudaya-lokal tidak dicegah atau menjadi ajang persaingan dan pertentangan, melainkan sebagai kerja sama yang saling menyuburkan. ●



Celah Mengatasi Korupsi

A. SETYO WIBOWO

Seperti udara yang dihirup tiap hari tanpa kita sadari, korupsi di Indonesia sudah semakin menjadi banal. Kita hidup di era banalitas korupsi

(Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (cetakan ke-2, 2013 (cetakan pertama 2011), hlm. xi).

Di jalan raya, sudah lama kita kehilangan adab. Semua dengan barbar berprinsip: yang besar dan nekat (berani menengolkan dulu moncong mobilnya) yang menang. Pejalan kaki dipaksa harus tahu diri bahwa dia miskin, tidak punya motor atau mobil, sehingga harus menyingkir (karena kalau tidak, ia akan dikhakson).

Di mana peraturan lalu lintas? Peraturan ada, tetapi pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi. Di Jalan Percetakan Negara ada lampu merah yang tidak ditaati karena memang tidak ada gunanya. Kalau ditaati, malah macet. Di dekat rumah saya, di sebuah persimpangan empat, lampu merahnya dimatikan karena membuat macet. Tetapi di Jalan Sudirman, peraturan ganjil genap sangat ditaati karena orang takut dengan kamera elektronik yang tanpa ampun akan memotret Anda kalau salah tanggal (meski isu yang beredar, banyak mobil yang memakai plat palsu). Peraturan lalu lintas memang ditegakkan, tetapi sebagian kecil saja. Umumnya, di jalanan yang berlaku adalah hukum rimba.

Di jalan raya, orang hidup memakai instingnya. Peraturan tak banyak diikuti, misalnya rambu lalu lintas dilarang parkir atau putar balik. Peraturan penting di luar negeri: kalau Anda di persimpangan segitiga, di mana Anda dalam posisi mau masuk ke jalanan yang lurus, maka prioritas adalah bagi pengguna jalan yang lurus. Anda harus menunggu sampai aman, baru boleh masuk. Di Indonesia, hal ini bahkan tidak menjadi peraturan sama sekali. Maka di jalan raya, hukumnya sederhana: siapa menengolkan dulu moncongnya, dia menang.

Mengapa polisi tidak menegakkan aturan di jalan raya? Mengapa hanya sekali-sekali saja mereka melakukan operasi?

Di ranah pelayanan publik di RT, RW, dan kelurahan sempit bersih, tetapi tak lama. Sekarang kembali lagi kebiasaan lama meminta uang pelicin. Padahal para pegawai di kelurahan atau bahkan kementerian adalah orang-orang yang memiliki pendapatan tetap atau gaji. Mengapa mereka masih korupsi?

Ada seorang teman yang berkeluh kesah tentang rumitnya mengurus surat izin usaha. Ia sudah *nyogok* 60–80 juta ke Pemda Kabupaten Semarang (Ungaran), ke polisi, dan ke LSM, namun hasilnya nihil. Izin usahanya tetap tidak keluar. Untung ada *Omnibus Law*, sehingga secara daring ia bisa mengurus surat izin. Meski begitu, di lapangan ia tetap saja direceki oleh preman, pemda, LSM, dan polisi yang mengatakan ini itu. Teman lain berkeluh kesah tentang sulitnya mengurus surat kehilangan. Di kantor polisi, ia hanya dilempar ke sana kemari, dan dijadikan mesin ATM oleh polisi.

Dilihat dari sisi pejabat pemerintah, ada kritik sangat keras tentang perilaku korup mereka. Padahal, sekali lagi, mereka itu sudah mendapat gaji tetap bulanan. Di kalangan politisi apalagi! Pada tahun politik, menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024, kita mendengar dan memaklumi bahwa: a) Biaya untuk menjadi anggota DPRD atau DPR sekian miliar (<https://www.merdeka.com/politik/fahri-hamzah-bocorkan-ongkos-pemilu-caleg-dpr-butuh-rp5-15-m-capres-minimal-rp5-t.html>, bdk. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/12/18470221/cak-imin-sebut-jadi-anggota-dpr-dari-jakarta-butuh-rp-40-miliar>), biaya untuk menjadi bupati atau gubernur sekian puluh

miliar; b) Hukuman para koruptor disunat; dan c) Para tokoh koruptor masih mendapatkan dukungan dan apresiasi dari sebagian masyarakat. Kita menganggap itu semua fenomena wajar, sama seperti kita sendiri (barangkali) rela merogoh uang 750 ribu atau 800 ribu demi mendapatkan SIM C atau KTP lewat jalur cepat. Kita tidak pernah merasa bersalah melakukan itu, kita tidak pernah kepikiran bahwa menyuap pejabat publik itu tindakan korupsi.

Dari sisi masyarakat, perilaku korup juga dianggap biasa. Masyarakat jengkel, namun mereka membayar juga uang-uang “amplopan” demi urusannya beres. Jadi, perilaku korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan atau di partai politik tak bisa dilepaskan dari persetujuan masyarakat yang menganggap itu semua sebagai hal yang biasa. Problem di jalan raya bukan hanya masalah polisi, tetapi juga perilaku masyarakat kita yang tidak punya respek pada hukum dan lebih percaya pada uang dan relasi daripada percaya pada hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Lihat saja trotoar di jalanan di Jakarta, Yogyakarta, atau Ambarawa, penuh pedagang. Bahkan, jalanan pun dipakai masyarakat untuk memarkir mobil. Masyarakat kita tidak ada yang takut pada hukum atau Perda yang melarang menggunakan ruang publik untuk kepentingan pribadi seperti memarkir motor, mobil, atau gerobak jualan.

Bagaimana dengan pendidikan? Dengan susah payah, pendidikan masih berusaha berbicara tentang integritas, meski contoh nyatanya sulit dilihat. Kita tidak usah berbicara tentang korupsi (pengutipan uang) di kampus (<http://forkas.stis.ac.id/2023/03/korupsi-membudaya-masyarakat-teperdaya.html>). Mari kita lihat soal plagiarisme yang parah terjadi di kampus-kampus. Pada bulan Februari 2023, harian *Kompas* memuat selama tiga hari berturut-turut investigasi mengenai cara-cara menjadi profesor dengan membuat tim khusus, atau cara menjadi master dan doktor secara gampangan dengan menyewa tim penulis. Plagiarisme sejak level SD (yang saya alami pada era Orde Baru) tak pernah diatasi, sehingga sekarang di level terendah sampai tertinggi korupsi makin dianggap biasa di dunia akademis. Dari profesor, doktor, master, sampai ke mahasiswa, semuanya seolah mengamini bahwa plagiarisme adalah sesuatu yang bisa diterima.

Saya punya pengalaman riil. Ada seorang teman yang baru saja dilantik menjadi profesor. Ia menelepon

rekan kerjanya di kampus lain, lalu berbincang-bincang tentang cara menerbitkan artikel internasional (yang sekarang menjadi “bisnis” di lingkungan dosen). Ia mengatakan, “Gampang. Bapak nanti saya masukkan sebagai penulis kedua dalam artikel yang akan muncul bulan depan.” Dengan cara ini, si Bapak akan memiliki penerbitan internasional meski dia tidak kerja apa-apa. Mengapa Bapak ini mau? Sederhana, karena Bapak ini menjabat direktur pascasarjana yang sedang merancang “Perjalanan studi banding mahasiswa S3 ke luar negeri”. Ia menawarkan pada koleganya tadi untuk ikut menjadi pendamping studi banding. Jadi, *quid pro quo*-nya jelas: menjadi pengarang di artikel jurnal internasional berbayar balik ikut jalan-jalan ke luar negeri. Praktik-praktik semacam ini dilaporkan oleh *Kompas* pada bulan Februari lalu (bdk. <https://www.kompas.tv/pendidikan/376973/demi-gelar-guru-besar-sejumlah-dosen-senior-dan-kampus-terlibat-perjokian-karya-ilmiah?page=all>).

Alasan utama praktik-praktik tidak jujur itu adalah “demi insentif”. Dalam kasus di atas adalah “jalan-jalan ke luar negeri”, dalam kasus lain, beberapa mengharapkan mendapatkan “tunjangan guru besar” yang lumayan banyak (<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/16/ingin-menjadi-profesor>).

Tentu saja tidak semua lembaga pendidikan seperti itu. Masih ada juga yang idealis dan berusaha bekerja apa adanya. Masih banyak juga mahasiswa yang bekerja dengan jujur untuk mendapatkan ijazah.

Bagaimana dengan agama, yang di Indonesia ini digaungkan sebagai benteng melawan dosa? Di Indonesia, sayangnya, agama yang sangat merusak ke seluruh bidang kehidupan justru menampilkan wajah koruptifnya yang paling absurd, misalnya membenarkan tindakan terorisme (membunuh orang lain), membenarkan tindakan diskriminatif (pemaksaan jilbab di sekolah negeri sebagaimana dituturkan Ibu Ari Wijaya pada acara “Diskusi Penyusunan Rekomendasi Penanganan Praktek dan Kebijakan Diskriminatif tentang Pengaturan Busana” yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 14 Agustus 2023 di Jakarta, soal ibadah dan rumah beribadah), membenarkan poligami, dan penundukan pada perempuan. Dan yang paling absurd, agama menjadi dagangan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Alih-alih mendukung orang melawan mental antikorupsi, agama justru menyuburkan praktik-praktik yang membusukkan integritas moral (Bdk. Erni, Muhamad Alim Ka’batul



ALEX PRACAYA "Tikus Gedhe Menang Kerahe"
100x120 cm, print on canvas/ Sangkring Art Space

“

Agama dipraktikkan secara transaksional manakala orang berpikir “sekarang korupsi *gak pa pa*, toh besok ada puasa dan hari korban, nanti dosa-dosaku bisa dihapus dengan puasa dan korban”. Ini mirip dengan praktik Gereja Abad Pertengahan yang menawarkan surat pengampunan dosa yang ditebus dengan jumlah uang tertentu.

Asror, "Degradasi Moral di Kalangan Pemuka Agama", Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora. Volume 13 Number 2 Oktober 2022, hlm. 237-243/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index>).

Tentu saja tidak semua ulama dan agama seperti itu. Namun, benar, banyak dari kita malah pesimis bahwa agama akan membawa manusia Indonesia makin etis. Mengapa? Karena agama di Indonesia sampai saat ini masih belum berhasil menumpas korupsi. Pemahaman agama secara transaksional justru membuat korupsi makin sulit diatasi. Agama dipraktikkan secara transaksional manakala orang berpikir "sekarang korupsi *gak pa pa*, toh besok ada puasa dan hari korban, nanti dosa-dosaku bisa dihapus dengan puasa dan korban". Ini mirip dengan praktik Gereja Abad Pertengahan yang menawarkan surat pengampunan dosa yang ditebus dengan jumlah uang tertentu.

Pengalaman di Prancis

Perilaku koruptif yang merembes di seluruh lini kehidupan ini sangat kontras dengan apa yang saya alami saat studi di Prancis. Negara sekuler dan cenderung antiagama ini justru relatif beradab. Di jalan raya, pejalan kaki dihormati, pesepeda tidak pernah diklakson oleh mobil. Pelayanan publik tidak pernah minta uang sogokan. Pendidikan juga dijalankan dengan jujur apa adanya. Di Prancis terkenal *joke*: "Sekolah adalah tempat untuk menunjukkan bahwa kamu bodoh." Ini karena guru di Prancis punya hobi memberi nilai rendah kepada murid-muridnya. Pernah pada awal tahun 2000-an ada seorang mahasiswa fakultas hukum Sorbonne menyontek. Langsung hal ini menjadi skandal nasional.

Untuk agama, Prancis sejak 1905 melarang pendidikan agama di sekolah negeri. Meski tidak belajar agama, anak-anak dilatih belajar menggunakan akal kritis dan bersikap toleran satu sama lain, tidak boleh rasis dan diskriminatif. Masyarakat di sana cenderung teratur, beradab, dan memiliki kesepakatan bahwa hukum harus ditegakkan oleh petugasnya dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Tidak boleh ada toko roti yang berdekatan, tidak boleh ada toko rokok atau toko koran yang berdekatan. Semua diatur oleh pemerintah daerah.

Peraturan di jalan raya juga ketat. Parkir sangat mahal, dan setiap saat dikontrol oleh satpol kota. Tilang elektronik ada di setiap lampu merah di ruas-ruas

jalan tol. Denda atas pelanggaran lalu lintas mahal. Pembatalan SIM juga diikuti dengan jeda waktu beberapa tahun tidak boleh memegang SIM. Saat jeda selesai, untuk mendapatkan SIM lagi, ia diwajibkan kursus ulang menyetrir yang biayanya mahal sekali.

Saya tidak tahu bagaimana sekarang. Beberapa teman yang baru pulang dari Jerman malah mengeluh bahwa *Deutsche Bahn* (KAI-nya Jerman) sekarang kacau. Kereta bisa terlambat berjam-jam. Sementara di Indonesia, KAI adalah contoh perbaikan yang luar biasa dalam sebuah perusahaan pelayanan publik.

Model Etika Publik

Dr. Haryatmoko, pada tahun 2011, menerbitkan buku *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Haryatmoko melihat masalah acakadutnya lembaga pelayanan publik yang penuh korupsi.

"Penanganan korupsi di Indonesia telah menusuk rasa keadilan karena hukuman ringan bagi koruptor, bahkan impunitas (tiada sanksi hukum). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedikit menyurutkan korupsi. Para koruptor tiarap, tetapi begitu mengetahui pola kerja KPK, mereka menemukan lubang-lubang baru untuk bangkit korupsi lagi. Lebih menyedihkan, dalam korupsi Kartel-Elite, situasi justru terbalik, KPK dipojokkan, bahkan dilumpuhkan.

Korupsi mengakibatkan pejabat mengabaikan kepentingan publik dan lebih memperhatikan kepentingan diri atau kelompoknya. Konflik kepentingan ini melemahkan komitmen pejabat publik pada nilai-nilai etika. Pelayanan publik yang berkualitas, relevan dan responsif nyaris tak ada gemanya. Padahal pertarungan kebijakan publik adalah memenuhi kebutuhan publik dan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Lemahnya komitmen ini menggerogoti integritas publik para pejabat dan politisi." (Haryatmoko, *Etika Publik*, hlm. ix).

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta) meresensi buku ini di <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/196>. Tulisannya, "Buku Haryatmoko - dosen tetap di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang juga mengajar di pelbagai perguruan tinggi lain di tanah air - ini menggabungkan dua hal yang jarang kita temukan: kompetensi filosofis dan penguasaan bidang penerapan yang bersangkutan. Etika publik

adalah bagian etika yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab dalam pelayanan publik, atau, dalam rumusan Haryatmoko, 'refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik'. Kekuatan buku ini adalah penulisnya bukan hanya ahli etika, melainkan juga ahli tentang bidang publik. Bidang publik memuat apa pun yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan oleh aparat negara, dewan perwakilan rakyat, dan pemerintah. Jelas sekali, kita amat berkepentingan agar seluruh unsur bidang publik luas itu dijalankan secara etis. Itulah yang dilakukan Haryatmoko secara mengesankan dalam bukunya ini."

Situasi kita hari-hari ini menegaskan analisis dalam buku tersebut. Sejak 2019, KPK malah mati suri. Pada tahun 2023, ditangkapnya orang-orang Katolik dan Kristen seperti Johnny G. Plate (Menkominfo, kader Nasdem, alumni PMKRI), Rafael Alun (pejabat perpajakan, lulusan SMA De Britto), dan Lukas Enembe (Gubernur Papua, Kristen Protestan) membuat kita semakin sadar akan "banalitas korupsi" (Haryatmoko, 2011: xi).

Menghadapi situasi yang sudah parah namun lumrah ini, Haryatmoko menganalisis bahwa masalah inti korupsi di birokrasi dan organisasi politik ada pada "sistem organisasinya". Untuk menanganinya, ia mengusulkan "pembangunan budaya etika di dalam organisasi" (Ibidem: ix).

Langkah pertama untuk membangun budaya etika dalam organisasi adalah: (i) Sistem organisasi harus mengintegrasikan etika publik (yang ditekankan di sini adalah soal *modalitas etika* - menjembatani norma dan keadaan faktual, bukan sekadar anjuran saleh) dalam pelayanannya untuk publik, dan bila ini terjadi, diharapkan (2) Terbangun integritas publik dalam diri politisi dan pejabat publik.

Pejabat dan politisi yang berintegritas merujuk pada seseorang dengan:

"Kualitas pribadi yang jujur, penuh komitmen, dan bisa dipercaya. (...) (memiliki) kemampuan memecahkan dilema-dilema moral dan tecermin dalam kesederhanaan hidup. Kualitas itu merupakan *habitus* yang diperoleh melalui pelatihan, pembiasaan, dan lingkungan, atau berkat infrastruktur etika (artinya 'budaya etika yang unsur pokoknya adalah akuntabilitas')" (Ibidem: xi-xii).

Haryatmoko percaya bahwa lewat pintu masuk sistem organisasi, individu akan terbantu membangun dirinya menjadi orang-orang yang jujur, berkomitmen, bisa dipercaya, dan sederhana. Lewat pembangunan budaya etika di organisasi, kita akan mendapatkan pejabat dan politisi yang berintegritas.

Bagaimana memunculkan budaya etika? Haryatmoko menekankan pentingnya akuntabilitas, yaitu: "(i) peran aktif *civil society* dalam pengawasan, (ii) pembaharuan sistem manajemen dengan menerapkan *E-Governance*, (iii) diterapkan prinsip subsidiaritas, dan (iv) *Good governance* dengan fokus pada infrastruktur akuntabilitas." (Ibidem: xiii)

Dalam angan-angan saya, usulan-usulan Haryatmoko ini sebenarnya sudah diterapkan saat era pemerintahan Jokowi dan Ahok di DKI (2012-2016). Pada saat itu, semua rapat di DPRD dan rapat dinas-dinas yang dihadiri oleh Gubernur bisa diakses secara daring oleh masyarakat. Anda bisa melihatnya misalnya di YouTube dengan mengetik "rapat dinas DKI 2013". Bahkan, debat dan diskusi tentang anggaran daerah pun bisa diikuti. Kita semua, bila mau, bisa ikut mendengarkan apa yang terjadi di ruang-ruang yang biasanya tertutup dan serba misterius. Ahok menerapkan *electronic governance*: pemantauan pekerjaan Pasukan Oranye, juga Pasukan Biru, Kuning, dan seterusnya, secara langsung lewat aplikasi. CCTV dipasang di mana-mana, dan sistem pelaporan masyarakat langsung ke Pemda DKI dilakukan lewat aplikasi. Saat kita melapor lewat aplikasi misalnya, ada pohon di dekat rumah yang sudah mengganggu tetangga dan meminta supaya ditebang, maka esok harinya, Pasukan Hijau datang membereskan pohon tersebut.

Tetapi, untuk pendekatan Etika Publik seperti itu, saya bertanya: sebenarnya, model pemerintahan yang akuntabel seperti itu muncul dari "sistem organisasi" atau dari Ahok-nya sendiri? Jawaban paling aman tentu "dua-duanya: ya sistem, ya individu". Namun, dalam kasus DKI, saya cenderung melihat bahwa Ahok-lah yang menciptakan sistem serba transparan itu. Scandainya saat Ahok berkuasa tidak ada alat-alat elektronik yang sekarang kita miliki, seperti kamera yang murah, platform yang gratis, akses internet dengan lebar pita yang mencukupi. Ahok ya tetap pemimpin yang transparan dan akuntabel. Mungkin laporan-laporan masih berbentuk kertas, tetapi wartawan bisa memintanya tiap saat. Gaya hidup dan

perilaku Ahok, meski tidak dipantau kamera, akan tetap apa adanya. Jadi, lepas dari "sistem organisasinya seperti apa", seorang pemimpin yang jujur akan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dengan sarana apa pun.

Saya cenderung yakin pada pendekatan individu, bukan organisasi, karena begitu Ahok selesai menjabat dan DKI dipimpin oleh Anies, maka semua sistem elektronik dimatikan. *Electronic Road Pricing (ERP)* yang sudah disiapkan oleh Ahok untuk mengendalikan jumlah mobil di Jakarta langsung dibuang oleh Anies. Balai kota DKI kembali menjadi tempat yang misterius. Kalau zaman Ahok, selama waktu kerja pukul 07.00-09.00 siapa pun bisa datang menemui Gubernur untuk segala keperluan, maka begitu Anies berkuasa, balai kota tertutup buat rakyat kecil. Dengan demikian, bila berkaca pada pengalaman di DKI, sepertinya di Indonesia analisis "individu" terasa lebih dekat dan riil.

Kita tengok model *e-governance* di lingkungan kampus dan dikti yang kita alami. Soal artikel internasional (terdaftar misalnya dalam *Scopus*) sudah diberitakan oleh *Kompas*. Terserah sistem akuntabilitas dan transpransinya secanggih apa pun, manusia (individu) di Indonesia ini cenderung mengakalinya. Demikian pula dengan laporan kinerja dosen (LKD) atau beban kerja dosen (BKD) yang tiap semester harus diisi. Apakah sebuah artikel tergolong jurnal nasional tak terakreditasi atau terakreditasi, sebagai asesor BKD, saya tentu gampang memilainya. Masalahnya, benarkah artikel di jurnal nasional terakreditasi otomatis "lebih bermutu" daripada yang tidak terakreditasi? Wallahu-lam. Tidak ada jaminan.

Sistem poin atau nilai angka untuk BKD juga absurd. Menulis artikel di *Kompas* nilainya hanya 0,375. Demikian juga artikel 20 halaman di majalah *Basis*, nilainya hanya 0,375 sementara untuk angka kreditnya hanya dihargai 1. Tetapi, artikel di jurnal nasional terakreditasi nilainya tinggi sekali, untuk BKD 3 dan untuk angka kreditnya bisa 25.

Padahal, kalau kita tahu susahnya menulis di *Kompas* atau di *Basis*, dan kalau kita lihat kualitas artikel-artikel di jurnal nasional terakreditasi, dengan gamblang kita bisa mengatakan bahwa yang pertama pasti lebih bermutu.

Sistem-sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi tentu baik-baik saja, namun sistem-sistem itu selalu bisa diakali. Dan reptonya, di Indonesia yang mengakali selalu lebih banyak. Model budaya etika

di organisasi yang ditawarkan Haryatmoko tentu bagus. Namun pertanyaannya: Benarkah model itu pasti "menghasilkan orang berintegritas"? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi sebaliknya, bila ada orang yang berintegritas, maka dengan sendirinya "model-organisasi yang akuntabel" pasti akan berjalan.

Model etika *Eudaimonia* yang individual

Mengikuti kajian etika klasik, misalnya dari Platon, saya cenderung yakin bahwa pengolahan karakter pribadi adalah yang paling penting. Untuk mencapai hidup yang *fully alive* (bahagia, *eudaimonistic*), manusia mesti mengolah dirinya (jiwanya). Platon hidup pada era demokrasi yang membusukkan masyarakat akibat dominasi uang. Maka, cara untuk mengatasi pembusukan (korupsi) masyarakat yang korup adalah dengan membentuk figur filsuf raja, yaitu individu atau sekelompok orang yang dididik dengan cara tertentu agar bisa menundukkan hasrat akan uang. Sebagai catatan penting, meski Platon mengusulkan rezim filsuf raja sebagai sebuah rezim ideal, Platon sendiri sadar bahwa sebagus-bagusnya rezim politik, ia akan tunduk pada siklus pembusukan. Maka di buku VIII *The Republic*, Platon mengatakan bahwa rezim filsuf raja akan membusuk menjadi timokrasi, lalu oligarki, demokrasi, anarki, dan akhirnya tirani. Maka, usulan tentang pentingnya membentuk "karakter individu" ini harus sejak awal disadari sebagai usulan yang sifatnya tidak mutlak, tidak kekal, seolah-olah sekali terbentuk lalu semua masalah hilang. Sama sekali tidak.

Menurut Platon, ada satu dorongan besar yang menjadi pusat energi manusia: *eros* atau hasrat untuk hidup. Manifestasi *eros* tersebut tampak dalam apa yang disebut tiga "bagian jiwa" (lihat Tabel Tiga Bagian Jiwa):

1. Hasrat untuk hidup pada level *basic*, yaitu makan, minum, seks, yang ketiganya bisa dirangkum dalam hasrat akan uang, dinamai *epithumia*. Dengan *epithumia* manusia bisa mengekalkan dirinya yaitu hidupnya berlanjut, juga bisa memperoleh keturunan;
2. Hasrat hidup untuk mendapatkan pengakuan sosial tampak dalam *thumos*. Ambisi utama para pahlawan homerik adalah mengekalkan dirinya lewat tindakan-tindakan heroik di medan tempur; dan
3. Hasrat hidup ketiga berkaitan dengan pencarian kekekalan lewat ilmu, filsafat, *sophia*. Secara ringkas, tiga "bagian jiwa" dengan tiga tipe manusia

serta tiga tipe rezim politik yang mengikutinya bisa diskemakan seperti di bawah ini.

Dalam visinya yang hierarkis, Platon melihat bahwa kodrat tiap orang berbeda. *Pertama*, ada yang kodratnya *epithumia*, terobsesi dengan hasrat makan, minum, dan seks, atau uang. Orang seperti ini akan bahagia kalau mendapatkan uang. Semua hidupnya diukur dengan uang. Dalam dirinya sendiri, hal ini tidak buruk. Kodrat ini bisa optimal kalau memiliki keutamaan keguharian (*sophrosune, modestia, moderation, self-control*). Para pedagang yang kaya, namun murah hati dan tidak serakah serta taat pada pemerintah adalah figur ideal *philokhrematos*. Namun, kodrat ini dapat memburuk bila tak mampu mengontrol dirinya. Baginya, uang adalah segalanya. Ia lalu membeli "harga diri" seperti gelar akademik dan gelar keraton. Lebih parah lagi, kalau serakah ia akan "membeli kekuasaan". Di sini, kita masuk dalam rezim oligarki dan demokrasi di mana hasrat akan uang yang tak terkendali mengatur pemerintahan. Situasi akan menjadi kacau, anarkis, dan memunculkan kerinduan akan "tangan besi" (tiran).

Kedua, ada pula orang yang kodratnya besar di *thumos*, rasa bangga diri. Dalam dirinya sendiri, ini tidak buruk. Kita membutuhkan orang-orang yang

dengan bangga meyakini "NKRI Harga Mati" supaya negara tetap utuh. Kita butuh atlet-atlet sepak bola yang mengharumkan nama bangsa di muka dunia. Kodrat ini, bila baik, artinya memiliki keutamaan kontrol-diri dan keberanian, akan menjaga keutuhan negara dan membuat negara termasyhur. Namun, bila orang ber-*thumos* besar ini tidak terdidik dengan baik, ia akan serakah; *menggunakan nama besarnya untuk mencari uang, dan menggunakan kekuatan tekadnya untuk menguasai negara*. Rezim yang muncul adalah rezim timokrasi, di mana atas nama "harga diri dan kebanggaan diri" semua dianggap tidak penting. Ketika tentara menguasai pemerintahan, maka pola pikir seluruh rakyat dibuat seperti serdadu di tangsi militer. Kalau rezim demokrasi dan oligarki menggunakan "uang" untuk menaklukkan segalanya, maka rezim timokrasi menggunakan "rasa takut kematian" sebagai cara menguasai rakyat.

Ketiga, Platon berbicara tentang *natural philosopher*, orang-orang yang sejak lahirnya berbakat besar pada *sophia* (kebijaksanaan). Bila dididik dengan benar, mendapatkan kurikulum pendidikan prarasional dengan baik lewat musik dan gimnastik, serta kurikulum pendidikan rasional dengan baik seperti aritmetika, geometri, astronomi, dan dialektika, orang yang

Tabel Tiga Bagian Jiwa

Bagian Jiwa dan Letaknya	Figur Manusia	Keutamaan yang Diharapkan	Rezim Politik
<i>Epithumia</i> (<i>appetite/desire</i> /perut ke bawah)	<i>Philokhrematos</i> – Orang yang disposisi karakternya terobsesi pada uang (makan, minum, seks); petani, pedagang, perajin	Keguharian (pengendalian diri, mawas diri, tahu diri)	Demokrasi Oligarki
<i>Thumos/Thymos</i> (<i>spirit/courage</i> /dada)	<i>Philotimos/Philonikos</i> (orang yang disposisi karakternya terobsesi pada harga diri, kemenangan dan kebanggaan diri); tentara	Keguharian + Keberanian	Timokrasi
<i>Logstikon</i> (<i>reason</i> /rasio/kepala)	<i>Philosophos</i> (orang yang disposisi karakternya terobsesi pada kebijaksanaan); filsuf raja	Keguharian + Keberanian + Kebijaksanaan	Filsuf Raja (Aristokrasi)



ANISA AGASHI, "Hilangnya Keberadaan"
80x60, acrylic on canvas, 2022 | Sangkring Art Space

“
Namun Platon juga menghadapi pertanyaan sulit: bagaimana bisa memunculkan individu seperti filsuf raja bila masyarakat yang ada dan sistem yang berjalan sudah busuk?”

berkodrat filsuf bisa memiliki keguharian, keberanian, dan kebijaksanaan. Namun sebaliknya, bila manusia berkodrat filsuf ini salah didik, ia akan menjadi *sofis*. Musuh abadi Platon ini adalah orang-orang berilmu, pandai, tetapi jauh dari kebijaksanaan. Ia memang pintar, tetapi sayangnya pintar untuk *minteri*/mengakali demi uang atau harga diri. Dalam rezim demokrasi, kaum *sofis* merajalela. Mereka menjual ilmu ke siapa saja yang bisa membayar dan atas nama kebebasan berpendapat. Sesuatu yang tampaknya demokratis dan populis karena mengajari siapa pun berdebat, padahal ia sedang menggerogoti demokrasi karena sejatinya ia hanya mengabdikan pada siapa pun yang mampu membayarnya. Wajar, bagi Platon, demokrasi yang dihuni kaum *sofis* akhirnya membawa demokrasi ke anarki dan kerinduan akan tiran.

Dengan analisis tentang ragam kodrat manusia, Platon mengusulkan *paideia*, yaitu pendidikan dalam arti kebudayaan, penuliran nilai-nilai adab ke generasi muda. Ia sendiri meninggalkan dunia politik, dan mendirikan *Akademia* di Athena.

Namun Platon juga menghadapi pertanyaan sulit: bagaimana bisa memunculkan individu seperti filsuf raja bila masyarakat yang ada dan sistem yang berjalan sudah busuk? Kita ambil contoh sederhana: bagaimana *mendidik* anak-anak Indonesia beradab di jalan raya? Sulit sekali. Bapak dan ibunya sering melanggar lalu lintas, masyarakat di jalanan yang ia lihat juga sering melanggar lalu lintas, polisi yang ia lihat juga gampang disogok. Bila masyarakatnya seperti itu, busuk, bagaimana memunculkan individu berkeutamaan? Sulit sekali. Platon kadang hanya mengatakan “bila saja keilahian berkehendak” mungkin ada perubahan. Kadang, Platon memberi ide yang mustahil: memisahkan anak-anak kecil dan dididik di luar masyarakatnya.

Kembali ke awal

Maka, kita kembali ke pertanyaan awal. Bila solusi Haryatmoko ternyata harus dibarengi dengan pendidikan karakter pada level individu, solusi yang saya baca dari Platon juga berhadapan dengan “sistem” yang begitu kuat sehingga inisiatif individual sekuat apa pun akan dinetralkan oleh sistem yang mahakuasa.

Perbaikan etis untuk korupsi di Indonesia mengandaikan perbaikan organisasi dan perbaikan karakter individual. Yang satu tentu lebih terbuka namun rumit/kompleks caranya, sementara yang lainnya lebih

subjektif dan agak misterius karena diri manusia itu begitu paradoksal, penuh misteri; manusia memang “bebas” tetapi ia dikondisikan oleh sistem di sekitarnya.

Korupsi dalam sejarah

Di tengah lingkaran-melingkar “telur dan ayam”, mana yang lebih dulu telur/individu atau ayam/organisasi, saya membaca buku Peter Carey tentang korupsi dari sudut pandang sejarah dan sudut pandang perbandingan antarnegara, *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi* (Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, Komunitas Bambu, 2016). Selanjutnya judul buku ini saya tuliskan singkatannya, *KSSI*.

Peter Carey memberikan analisis yang kita semua, kurang lebih, tahu: korupsi di Indonesia memang parah, dan pengatasan korupsi membutuhkan “revolusi mental” yang kompleks karena, misalnya, dalam kasus Inggris, proses perubahan mengandaikan adanya perbaikan sistem serta pencangkakan nilai-nilai baru seperti etika Protestan dan filsafat utilitaris. Namun, hal baru yang menarik untuk saya utarakan di sini, Peter Carey menegaskan bahwa perbaikan suatu negara dalam mengatasi korupsi hanya bisa terjadi bila ada faktor paksaan.

Di mana *sense of crisis* kita?

Peter Carey memulai analisis dalam bukunya ini dengan menyatakan: “*Sense of crisis* terhadap bahaya korupsi belum dapat terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah maupun sikap masyarakat” (“Kata Pengantar” oleh Rimawan Pradiptyo, hlm. xi). Apa artinya *sense of crisis*? “*Sense of crisis* ini mengindikasikan apabila mereka tidak melakukan penanggulangan korupsi, *keberlangsungan negara mereka menjadi bermasalah*” (Ibidem: xiii).

KSSI memberi analisis menarik untuk menelaah fenomena korupsi di Indonesia yang sejak buku ini terbit (Desember 2016) sampai sekarang tidak mengalami perubahan.

“Menarik untuk dicermati bahwa praktik-praktik korupsi di Hindia Belanda pada zaman VOC ataupun di Inggris abad ke-18 (1660-1830) tidak jauh berbeda dengan praktik korupsi di Indonesia kontemporer. Sistem penggajian pegawai negeri dengan penerimaan gaji kecil dan tidak manusiawi, tapi para pegawai negeri diberikan hak menerima tambahan pendapatan sebagai pelaksana proyek

pemerintah, seperti yang terjadi di Inggris abad ke-18 dan Indonesia sejak Orde Baru. Suatu sistem yang lazim bagi pegawai negeri yang menerima bingkisan atau *fee* dari klien, meskipun jasa yang dilakukan PNS tersebut adalah tugas pokok fungsinya. Salah satu eksekusi dari sistem penggajian yang tidak rasional tersebut adalah praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di jalan-jalan maupun di masyarakat” (Ibidem: xiii).

Menurut Peter Carey, korupsi di Indonesia bersifat struktural, artinya, ia muncul “akibat peraturan yang justru mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi”, contohnya sistem insentif di sektor publik di mana gaji tidak sama dengan penghasilan *take home pay*. Sistem ini memunculkan model kompleks ragam tunjangan, uang perjalanan, dan uang rapat. Konsekuensi lainnya adalah kebiasaan melakukan *mark up* anggaran dalam ragam proyek yang ditangani karena besarnya proyek akan berbanding lurus dengan penerimaan para pelaksana, ketua, dan penanggung jawab proyek tersebut (Ibidem: xv).

Contoh lainnya adalah adanya aturan-aturan seperti indikator kinerja di kementerian dan lembaga yang dilandaskan pada “penyerapan anggaran” (*output*), dan bukan pada dampak riil (*outcome*) sebuah kegiatan. Semakin anggaran APBN atau APBD banyak diserap, maka semakin bagus kinerjanya! Ini yang memunculkan fenomena ajaib di Jakarta, yaitu: di satu sisi, pada era Ahok, anggaran sering tidak terserap, tetapi hasil pembangunan fisik terlihat di mana-mana, misalnya kali Ciliwung dirapikan, 14 *underpass* dan *flyover* terbangun, lingkaran susun Semanggi yang fenomenal, sehingga Ahok selalu bermasalah dengan BPK; di sisi lain, pada era Anies, anggaran sebanyak 80 triliun per tahun (kali 5 tahun = 400 triliun) terserap dengan cepat, namun kita tidak melihat hasil apa-apa, kecuali jalan raya yang dicat untuk jalur sepeda dan bongkar susun trotoar. Nah, anehnya, BPK malah tutup mata atas berbagai “kelebihan bayar” yang terjadi pada era Anies.

Aturan lain yang aneh dan turut mendorong perilaku korupsi struktural adalah sistem di mana PNS tidak bisa dipecat. Sekali orang diterima menjadi PNS, maka ia mendapat gaji dan pensiun seumur hidup, bahkan setelah ia mati pun, istri/suami masih mendapat tunjangan. Tak heran proses rekrutmen PNS dan anggota TNI serta Polri sarat dengan uang kutipan,

karena iming-imingnya memang luar biasa, yaitu digaji negara seumur hidup, tanpa risiko apa-apa.

Hal lain yang membuat korupsi bersifat struktural adalah karena adanya tiga sistem remunerasi yang berbeda yang berjalan bersamaan di kalangan pegawai negeri di Indonesia:

1. Sistem penggajian yang sudah ada sejak Orde Baru dan diteruskan pada era Reformasi,
2. Sistem *single salary* sebagaimana diterapkan di KPK, BI, OJK, dan BRR di Aceh saat terjadi tsunami, dan
3. Sistem penggajian di departemen keuangan yang diinisiasi Sri Mulyani (2005-2010) (bdk. Ibidem: xvi).

Di luar PNS, kelompok swasta memiliki sistem remunerasi yang sangat bervariasi. Meskipun ada aturan UMR di tiap provinsi, perusahaan swasta tidak selalu mengikutinya.

Model penggajian PNS yang berbeda-beda, ditambah ego sektoral tiap lembaga dan kementerian, membuat koordinasi pekerjaan pelayanan publik sulit. Saat koordinasi menyangkut sebuah proyek, maka ada pihak yang ingin supaya proyek di-*mark-up* supaya *output* (penyerapan) bagus, dan dengan demikian ada “tambahan cipratan”, sementara pihak lainnya maunya bekerja lurus-lurus saja mengejar *outcome* (dampak) karena merasa sudah cukup dengan gaji yang ada.

Hal struktural lainnya lagi yang memperparah korupsi adalah otonomi daerah yang kebablasan (Ibidem: xix). Akibat kebijakan otonomi daerah, dinas-dinas di provinsi dan daerah terputus dari kementerian terkait di pusat. Akhirnya, jargon “koordinasi dengan pusat” hanya menjadi pemanis bibir karena *de facto* dinas-dinas hanya mengabdikan pada penguasa daerah.

Kesamaan dengan era Diponegoro dan Inggris pada abad ke-18

Menurut analisis Peter Carey, pola-pola struktural seperti di atas bukan hal baru. Kita bisa menemukannya pada era-era sebelum Indonesia merdeka.

Era Daendels dan Diponegoro

Marsekal Herman Willem Daendels ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal di Jawa (1808-1811) oleh Raja Louis dari Belanda untuk mereformasi pemerintahan bekas VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*,

1602-1799) yang korup (Ibidem: i). Dengan melakukan sentralisasi kekuasaan, Daendels mulai memerangi korupsi yang sebelumnya merajalela sebagaimana laporan berikut ini.

“Para pejabat bawahnya lebih banyak hidup berkat sumber pendapatan gelap. Ini berdampak besar terhadap pembentukan birokrasi yang terpusat pada Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Dengan mudah para pejabat rendah melakukan suap kepada pejabat yang lebih tinggi” (Ibidem: 2).

Peter Carey menunjukkan gambar Pangeran Diponegoro yang marah dan menampar Patih Yogya yang korup, Danurejo IV (menjabat 1813-1847), dengan selop. Diponegoro marah karena soal penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa pada masa sebelum perang Jawa (1825-1830). Menurut Peter Carey, “pada zaman Diponegoro, masalah korupsi menjadi suatu pemicu utama Perang Jawa meskipun sama sekali tidak dibahas di buku pelajaran sekolah di Indonesia saat ini” (Ibidem: xxix).

“Arus uang yang melimpah ruah dengan datangnya para penyewa tanah dari Eropa setelah Agustus 1816 di Pulau Jawa, waktu koloni Hindia Timur dikembalikan Inggris kepada Belanda, membuka jalan bagi para pejabat pribumi korup seperti Danurejo IV di Yogya untuk cepat memperkaya diri dengan cara yang dilukiskan sejarawan pribumi pertama dari Perang Jawa, Raden Adipati Joyodiningrat (...)” (Ibidem: xxxi)

Peter Carey menggambarkan situasi Jawa pasca Agustus 1816 mirip dengan “*booming* minyak” pada era Soeharto (Desember 1973). Saat harga minyak naik tiga kali lipat, praktik penyelewengan kontrak, *mark up* proyek, dan penjarahan gila-gilaan pun langsung terjadi. Cara Patih Danurejo korupsi mirip dengan era Orde Baru, dan cara kerjanya bisa disejajarkan dengan Akil Mochtar (ketua MK yang korup) pada era Reformasi. Raden Adipati Joyodiningrat menggambarkan korupsi Danurejo IV sebagai berikut:

“Agar perkara selesai, segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo IV. Barangsiapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang. Jika pihak yang kalah menolak menerima (vonis/putusan), maka perkara yang lebih berat akan ditimpakan pada mereka atau akan difitnah bahwa orang itu memelihara perampok (dan) saksi-saksi yang mahir

merekayasa bukti akan dipanggil. Pada akhirnya pihak yang telah (lebih dulu) menolak (vonis/putusan) akan dihukum atau diwajibkan membayar denda” (Ibidem: xxxii)

Secara umum, lewat kajiannya, Peter Carey menunjukkan bahwa perilaku korup sudah panjang sejarahnya di tempat kita: sejak era VOC sampai era pasca-Daendels.

“Pola-pola korupsi dengan dimensi internasional yang terus bertahan tampaknya memang bisa ditelusuri sejak masa kolonial. Prototipenya mungkin bisa dilihat pada kawin campur rezim korup patrimonial pribumi dengan maskapai dagang kolonial VOC selama abad ke-17 dan ke-18 yang terus berlanjut dalam praktek korup birokrasi kolonial secara lebih massif dengan kendali utama *Binnenlands Bestuur* (administrasi dalam negeri Hindia Belanda) dalam bentuk perampokan sumber daya alam dari negeri jajahan untuk pasar internasional pada era Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel* (1830-1870) (...) Inilah mata rantai yang harus disambungkan kembali ketika kita harus melihat akar-akar global korupsi Indonesia sejak Orde Baru, bahkan masa sebelumnya.” (Ibidem: 89-90)

Perbandingan dengan Inggris

Setelah memperlihatkan aspek sejarah korupsi di Hindia Belanda, Peter Carey menawarkan studi komparasi dengan Inggris. Ia berbagi pengalaman tentang negaranya, Inggris. Ia mengatakan bahwa “abad ke-18 yang panjang (*the long eighteenth century, 1660-1830*)” adalah era yang korup.

“Pada abad ke-18 yang panjang itu, Inggris adalah negara dengan sistem pemilihan kandidat Majelis Rendah di sekitar perkotaan atau kota kecil yang busuk. Kursi-kursi parlemen dengan jumlah populasi sangat kecil membuat pemilih disuap gila-gilaan oleh para tuan tanah. Karena tidak ada pemungutan suara secara rahasia di Inggris hingga tahun 1872, para tuan tanah (...) bisa mengusir warga yang tidak memilih kandidat yang mereka dukung. (...) Patronase semacam ini melibatkan raja yang dapat menjamin dukungan politik di parlemen dengan menggunakan ‘orang titipan’ atau ‘*placement*’, yaitu orang-orang yang ditunjuk kerajaan serta memegang jabatan-jabatan sipil dan militer yang secara konsisten mendukung kepentingan raja di Majelis Rendah.

Penunjukan pada pos-pos yang menguntungkan seperti juru bayar dari Angkatan Bersenjata Inggris hampir pasti akan menjamin pemegang jabatan dengan keberuntungan seumur hidup. Syaratnya tentu saja bila semua uang belanja dan penggajian militer yang ditetapkan oleh Parlemen mengalir melalui tangtangannya" (Ibidem: 51-53).

Faktor Paksaan

Bagaimana akhirnya Inggris bisa lepas dari korupsi? Analisis Peter Carey sederhana: "obat paling manjur untuk memberantas korupsi adalah ketakutan atas keadaan yang begitu mendesak. Seperti pedoman Mahatma Gandhi, "Jarang menjadi baik hanya demi kebaikan, mereka menjadi baik karena keadaan mengharuskan" (Ibidem: xxxiii).

Kalau Inggris akhirnya "bertobat" dan mengubah sistem tata kelola pemerintahan, itu karena mereka dihantui oleh kehancuran sistem finansial dan kekalahan militer (bdk. Ibidem: 74). Kekalahan Inggris di Amerika dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1775-1783 diikuti dengan membengkaknya utang Inggris menjadi 250 juta poundsterling (setara 7,5 triliun dolar AS). Untuk menutup defisit, pemerintah Inggris lalu menaikkan pajak bumi, sehingga situasi politik menjadi kacau. Muncul ketegangan politik, sedemikian runyam sehingga ada yang mengusulkan agar Britania Raya diubah menjadi republik.

Dalam situasi bahaya seperti itu, elite Inggris mulai sadar pada dampak buruk korupsi dan kejahatan terhadap "kepentingan nasional", yang sebenarnya sudah lama mereka rasakan menjadi masalah. Mulai muncul upaya-upaya untuk memangkas birokrasi, menghemat biaya pemerintahan, dan mereformasi Parlemen (bdk. Ibidem: 72). Hal ini berlanjut dengan reformasi Konstitusi secara keseluruhan dan penghapusan *Old Corruption* (Ibidem: 73). Pemerintah Inggris bahkan melakukan penegakan hukum yang ekstrem: hukuman mati kepada kelompok elite (Ibidem: 79-80).

Pakar korupsi internasional, Mark Philp, berpendapat bahwa korupsi di dunia Barat secara umum bisa ditangani karena ada dua "cara berpikir" yang tertanam dalam-dalam di benak orang-orang Barat:

1. Pengaruh gerakan injili, khususnya Kristen Protestan, yang memperlakukan pelanggaran aturan sebagai tanda kelemahan yang lebih dalam. Artinya, bila orang melanggar peraturan, ia bukan hanya secara hukum salah,

tetapi ia adalah orang yang gagal menjaga kemurnian hatinya (Bdk. Ibidem: 65). Efeknya, ada kesadaran untuk merefleksikan bahwa di balik segala tindakan, ada yang namanya "kemurnian motif"; dan

2. Pemikiran republikan dari tradisi Romawi yang menganggap bahwa motif-motif kepentingan diri bisa menjadi bahaya bagi keselamatan bersama atau kepentingan publik (Bdk. Ibidem: 66).

Dua hal itu membaharui masyarakat Inggris, dan mampu membaharui institusi-institusi penting di Inggris, seperti Angkatan Darat dan Universitas Cambridge dan Oxford yang pada abad ke-18 dirundung perkara korupsi yang parah.

Namun sekali lagi, "cara berpikir baru" itu baru benar-benar efektif berjalan manakala ada paksaan-paksaan. Tanpa itu, revolusi mental atau perubahan cara berpikir tidak akan terjadi.

"Contoh dari Inggris selama abad ke-18 yang panjang itu menggarisbawahi korupsi yang terlembaga tidak bisa diberantas dengan tindakan reformasi yang berdiri sendiri atau perubahan kelembagaan yang bersifat satu demi satu tetapi oleh sebuah perubahan ideologi dan politik mendasar yang memicu suatu perasaan kolektif lebih kuat. (...) Namun, suatu perubahan ideologi dan politik mungkin tidak cukup sendiri untuk menghapus atau menurunkan korupsi dalam kasus Indonesia" (bdk. Ibidem: 97).

Buku *KSS* berkesimpulan bahwa korupsi – dengan segala dampaknya yang sangat merugikan – belum ditanggapi dengan *sense of crisis* atau *sense of urgency* yang seharusnya.

"Anomali perilaku para politisi, birokrat, dan penegak hukum masih sering ditemui dalam hal penanggulangan korupsi. Alih-alih memerangi korupsi yang terjadi, seringkali terjadi gesekan antara Lembaga penegak hukum terkait dengan beberapa kasus korupsi" (Ibidem: xxv).

Padahal, soal korupsi harus dianggap penting bila kita tetap ingin hidup dalam kerangka demokrasi. Mengapa? Karena korupsi berdampak langsung pada prospek demokrasi serta menghilangkan kepercayaan pada institusi-institusi politik. Korupsi mengabaikan

penegakan hukum, artinya korupsi mendelegitimasi salah satu ciri pokok rezim demokrasi, yaitu konstitusi. Selama korupsi tidak dianggap masalah urgen, maka tidak akan ada penanggulangan atasnya.

"Dalam buku ini (*KSS*) Pak Peter berpendapat bahwa upaya penanggulangan korupsi di beberapa negara Eropa tersebut tidak terlepas dari unsur keterpaksaan, mengingat alternatif untuk tidak melakukan pemberantasan korupsi adalah munculnya bahaya yang tidak terbayangkan. Fakta serupa juga kita temukan pada kasus pemberantasan korupsi di Hongkong, Singapura, dan Korea Selatan" (Ibidem: xxv).

Epilog: pertanyaan soal parpol

Satu hal menarik lainnya dari kebangkitan Inggris adalah peran swasta dalam menciptakan kultur anti-korupsi. Masalahnya, di tempat kita, tampaknya definisi korupsi hanya berlaku bagi mereka yang menjadi pejabat publik (pegawai negeri). Pihak swasta bisa dikenai pasal korupsi sejauh mereka berinteraksi dengan pejabat publik. Namun, antara pihak-pihak swasta, rasanya sulit menerapkan tuduhan korupsi (<https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-di-sektor-swastayang-luput-dari-perhatian-1t5c6fedbc7a70/>). Paling banter, kalau ada dua pihak swasta yang berselisih, pasal yang dikenakan adalah pasal KUHP tentang penipuan atau penggelapan uang.

Sementara itu, soal korupsi swasta sudah diatur di luar negeri atau di perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di Indonesia. Perusahaan asing menerapkan standar ketat, misalnya suap pada perusahaan swasta lain dilarang. Tetapi untuk swasta di Indonesia, rasanya belum ada aturan.

Kaum swasta di Indonesia bekerja mengikuti mekanisme internal. Jadi, kalau perusahaan mengatur bahwa karyawannya dilarang meminta uang upeti, maka bila ia melakukan, ia bisa dipecat. Tetapi, kalau perusahaan tidak memiliki aturan seperti itu, dan perusahaan tutup mata terhadap praktik-praktik seperti itu, maka ada suap-menyuap di situ.

Misalnya saya mempunyai usaha swasta berupa toko roti. Saya ingin menjadi penyuplai di hotel atau katering perusahaan swasta lain. Nah, karena persaingan ketat, saya menawarkan diskon besar-besaran. Atau, untuk pesanan jumlah tertentu, saya menawarkan bonus hadiah iPhone 16 Pro Max. Tentu hal seperti ini banyak kita jumpai, dan dianggap tidak

masalah. Praktik ini mirip dengan cara sopir bus wisata membawa rombongan ke restoran-restoran tertentu karena ia mendapatkan sesuatu dari restoran tersebut. Apakah ini korupsi? Rasanya di Indonesia hal seperti ini dianggap wajar, bukan korupsi.

Persoalan menjadi menarik kalau kita bertanya: partai politik itu sebenarnya negeri atau swasta? Sepemahaman saya, partai politik adalah badan hukum (<https://ntt.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6876-partai-politik-sebagai-badan-hukum-apabila-terdaftar-di-kemerkumham-ri-seuai-persyaratan-dan-ketentuan-peraturan-perundang-undangan>), mirip dengan LSM atau ormas yang biasanya lalu bernaung di bawah sebuah lembaga, yayasan, atau perkumpulan (<https://prolegal.id/mengenal-beragam-badan-hukum-di-indonesia/#:~:text=Namun%20dilihat%20dari%20fungsinya%2C%20badan,Koperasi%2C%20Yayasan%2C%20hingga%20Perkumpulan>). Bila demikian, parpol berperilaku seperti swasta.

Sejauh anggota parpol tidak menjadi pejabat publik, misalnya menteri atau komisaris BUMN, dan sejauh anggota parpol tidak berinteraksi dengan instansi publik, maka perilaku *money politics*, misalnya kebiasaan memberi mahar kepada petinggi partai untuk bisa menjadi caleg (<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/13/16411591/bantah-soal-mahar-rp-35-miliar-nasdem-jika-ada-pasti-akan-kita-tindak>) memang tidak bisa dijerat sebagai korupsi. Demikian pula, "ongkos menjadi caleg" yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran (<https://www.cnnindonesia.com/longform/nasional/20190402/laporanmendalam-ongkos-mahal-politik-wakil-rakyat/index.html>, <https://jco.kompas.com/buka-bukaan-biaya-caleg-demi-kursi-di-senayan>, dan <https://news.detik.com/kolom/d-6176523/melongok-biaya-nyaleg-2024>) hanya akan dianggap sebagai "biaya investasi", seperti kalau saya membuka toko roti saya juga butuh modal awal.

Nah, bila pilar utama demokrasi adalah parpol, sementara perilaku parpol di Indonesia seperti perusahaan swasta yang tidak mengenal korupsi, maka pekerjaan rumah kita melawan korupsi memang luar biasa besar. Selama 25 tahun Reformasi, parpol adalah badan hukum yang menikmati *semua manisnya demokrasi*. Parpol memiliki hak istimewa mengajukan calon penguasa mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Memiliki kekuasaan artinya memiliki wewenang legal. Wewenang tak lain adalah akses ke

segala sumber daya manusia dan alam yang ada di bawah pemerintahannya. Dalam bahasa yang sederhana, kekuasaan memberi legalitas untuk mengeruk apa pun yang bisa dimanfaatkan, baik untuk diri sendiri, atau, seharusnya, untuk kepentingan umum.

Begitu besar kenikmatan yang diberikan demokrasi kepada parpol berupa hak prerogatif mengusulkan penguasa yang berwenang mengeruk apa pun yang ia mau. Namun, selama 25 tahun Reformasi ini, justru cara kerja parpol sangat gamblang tidak demokratis. Parpol kita bersifat feodalistis tanpa ampun dan korup tanpa malu. Semua parpol sibuk “dagang sapi” *bacopras-bacapres* setiap mendekati pemilu. Apa yang mereka lakukan setelah pemilu selesai? Sunyi senyap. Kita tak pernah mendengar kontribusi nyata para politisi parpol di RT, RW, kelurahan, atau di bidang-bidang kehidupan masyarakat yang seharusnya menjadi *raison d'être* parpol itu sendiri.

Jadi, bagaimana, apakah parpol dibuang saja? Tidak bisa. Demokrasi hanya bisa hidup dengan parpol. Tidak ada demokrasi tanpa parpol.

Atau, kita harus mulai berpikir bahwa parpol dengan kriteria tertentu *dijadikan negeri saja*? Dengan mendapatkan pembiayaan dari negara, misalnya dari pajak, maka instansi pemerintah dan rakyat (swasta) bisa mengontrol parpol dengan lebih efektif. Parpol tidak bisa lagi bekerja seperti toko roti yang menaikkan atau menurunkan harga sekenak jidatnya, merekrut dan memecat pegawai sekehendak hatinya dan mengumbar diskon atau *kick back* semau perutnya. Parpol harus dipaksa demokratis yang cirinya: a) tunduk pada aturan yang ber-HAM, dan b) memiliki pergantian pimpinan secara reguler supaya perilaku korup mereka bisa ditangani.

Atau, kalau kita berkeberatan negara membiayai parpol, bisa juga kita mengusulkan ada undang-undang yang mengatur korupsi di kalangan swasta.

Namun, perbincangan tentang parpol ini, sekali lagi, mengandaikan bahwa korupsi adalah *sense of crisis* kita. Sayangnya, kementerian sekretariat negara sendiri mengatakan bahwa, menurut survei nasional, soal korupsi hanya menjadi prioritas nomor dua di bawah *concern* soal lapangan kerja (https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi).

Tawaran akhir

Sebagai semacam kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa ada beberapa tawaran cara mengatasi korupsi. Pertama, dengan pendekatan sistem (Etika Publik), kedua melalui pendekatan individual (pendidikan karakter), dan ketiga lewat pendekatan historis-pragmatis yang menonjolkan faktor keterpaksaan. Korupsi akan kita tangani kalau *survival* kita sebagai bangsa terancam.

Tentu kita tidak harus menunggu adanya *force majeure*, sebuah ancaman luar biasa besar, yang memaksa kita melawan korupsi. Saat ini pun kita bisa melakukan *piecemeal approach* seperti menu *à la carte*. Tanpa menunggu kegentingan, bila kita rasa korupsi bisa ditangani lewat satu hal, maka mulai saja dengan problem itu. Misalnya, kita mulai mewacanakan agar parpol dibiayai negara, atau bila tidak mungkin, agar ada aturan korupsi untuk swasta. ●

A. Setyo Wibowo

dosen STF Driyarkara, Jakarta

Red.: Naskah ini pernah disampaikan dalam *Studium Generale* di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam rangka memberi penghormatan kepada Dr. Haryatmoko.

Gerakan Mahasiswa dalam Pusaran Neoliberalisme

Catatan 25 Tahun Reformasi Konstitusi

A. D. HANDOKO



GALIH REZA, "Don't You Care if we drown?"
140x180 cm aoc, 2023